

**PENGELOLAAN WISATA PANTAI BALONGAN DALAM UPAYA
PENDISTRIBUSIAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

M. Mun'im¹, Heri Kuncoro Putro², Agus Wahyu Irawan³

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Muhammadmunim60@gmail.com, heri.kuncoro@gmail.com,

aguswahyuirawanw@gmail.com,

ABSTRACT

This research aims to determine the process and role of managing Balongan beach tourism potential towards equal distribution of community income in Balongmulyo Village, Kragan subdistrict. How is the management process carried out so that the process can achieve the targets desired by various stakeholders. The method used in this research is descriptive qualitative. The methods used in collecting data in this research were interviews, observation and documentation. The research results show that Balongan beach tourism uses a form of community-based tourism management or Community Based Tourism (CBT). This form of management prioritizes the concept of harmony between stakeholders, namely the community, government and private sector (investors). To achieve this management requires a long process, namely from the planning, implementation to maintenance stages. Then the role of managing Balongan beach tourism potential is the economic impact that is most recognized by the people of Balongmulyo, namely the equal distribution of income for the people of Balongmulyo. Because the management of Balongan beach tourism can open up employment opportunities for the people of Balongmulyo and the surrounding community by selling or as builders and increasing people's income.

Keywords: Tourism, Tourism Management, Income distribution.

PENDAHULUAN

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru di dunia. Menurut *Spinllane* yang dikutip oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo, pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat¹ selanjutnya pariwisata juga mampu memberikan support terhadap perkembangan industri dan peluang terbukanya pekerjaan, serta keuntungan terakhir yaitu pariwisata bersifat *multiplier effect*, dimana pendapatan dari pariwisata mampu membangkitkan perekonomian masyarakat lokal². Bahkan pada beberapa daerah menunjukan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikan sebagai sumber utama pendapatan³ Pembangunan ekonomi suatu daerah selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memilih garis pertumbuhan ekonomi ataukah pemerataan pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat sudah tidak dapat lagi dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan merupakan realita dalam kehidupan ekonomi di Negara yang sedang berkembang. Sebaliknya di Negara maju semangat untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan yang paling penting dari segala kegiatan ekonomi.

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang mempunyai potensi pariwisata cukup besar, diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa yang terus meningkat setiap tahunnya. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 4,25 persen⁴ dan penerimaan devisa pariwisata pada tahun 2015 diperkirakan mencapai US\$12.23 miliar⁵ Pengembangan pariwisata pada suatu destinasi wisata diharap agar dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dapat tercapai, dengan demikian untuk pengembangan pariwisata perlu adanya *destination management organization*.

Dalam konteks ini, *destination management organization* merupakan satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu pariwisata seperti perusahaan wisata, provider pelayanan dan lainnya yang cukup kompleks. Dalam *destination management organization* terdapat satu tujuan dan arahan untuk mencapai pengelolaan dari sebuah destinasi, yaitu adanya kelembagaan yang mengelola destinasi⁶ Penyusunan, pengembangan dan tata kelola kelembagaan (bisa lembaga baru) perlu mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan, sumber daya organisai (nyata, tidak nyata, sumber daya manusia, pengembangan pola kemitraan dan lain-lain)⁷

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41

² Ni Luh Henny Andayani, *Manajemen Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 73

³ Daryanti, "Kontribusi Objek Wisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singing menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 175

⁴ <http://bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1329/proporsi--kontribusi-Pariwisata-terhadap-pdb-2015>. Diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 00.11. WIB.

⁵ <http://bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1357/jumlah-devisa-sektor-Pariwisata-2015.html>. Diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 00.31. WIB.

⁶ Ni Luh Henny Andayani, *Manajemen Pemasaran Pariwisata*, 75

⁷ Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 57

Sumber daya manusia di bidang pariwisata dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu, sumber daya manusia berada di lembaga pemerintahan: menghasilkan kebijakan/pembangunan pariwisata, yang kedua sumber daya manusia berada di lembaga pendidikan namun belum terlibat langsung usaha pariwisata, terdiri dari: manajemen/karyawan, pendidik dan anak didik (mahasiswa), yang ketiga sumber daya manusia terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, pihak yang berperan menghasilkan produk dan jasa bagi wisatawan dalam kegiatan usaha formal yang terdiri dari pengelolaan wisata, meliputi pengusaha sektor formal usaha pariwisata yang mengelola berbagai usaha pariwisata⁸ Pengelolaan pariwisata yang ideal dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjadi kerjasama yang baik dan berkelanjutan pemerintah dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek, akan tetapi lebih ke partner. Dengan menjalankan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merusak kearifan lokal. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam undang-undang kepariwisataan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat⁹ Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/ CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya

Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan *bottom-up*, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan *top-down*, inisiatif berasal dari pemerintah. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka¹⁰ Pantai Balongan sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata terutama kondisi alam yang memiliki banyak keunikan serta budaya warisan leluhur yang masih terpelihara. Namun demikian, sebelum terbentuknya wisata pantai Balongan tempat tersebut sering digunakan para remaja untuk kegiatan yang kurang positif seperti mabuk-mabukan dan perkelahian, selain itu juga banyak sekali masyarakat Balongmulyo yang menganggur sehingga terhambat dalam perekonomian dan rendahnya pendapatan yang mereka peroleh¹¹

METODE PENELITIAN

⁸ Sedarmayanti, Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata, 63.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab III Mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5.

¹⁰ Dimas Kurnia Purmada dan Luchman Hakim, "Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism", Jurnal Administrasi Bisnis 32, no. 2 (2016): 16.

¹¹ Observasi di Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang pada Tanggal 11 September 2023

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Di sini peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan mengadakan penyelidikan secara langsung di lapangan untuk berbagai masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.¹² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dan sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan studi dokumen.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pariwisata

Richard Shite dalam Showan Hanief dan Dian Pramana menjelaskan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dikerjakan salah individu untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu objek ke objek lainnya dengan meninggalkan tempat semula, dengan perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan bertamasya dari rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹⁴ pariwisata juga merupakan objek yang dapat dijadikan sebagai pembuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian dan juga dapat dijadikan sebagai objek tempat berkunjung bagi wisatawan untuk menikmati keadaan alam dalam jangka waktu pendek atau Panjang. Sedangkan menurut *World Tourism Organization* (WTO) pariwisata di artikan sebagai kegiatan seseorang yang sedang berpergian ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya dalam waktu yang tidak bisa ditentukan untuk kesenangan atau kegiatan berbisnis.¹⁵

2. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan pariwisata dan lingkungan menurut Darsoprajitno yang dikutip oleh I Gusti Bagus Rai Utami menyatakan, alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dengan menerapkan asas pencagaran sebagai berikut:

- a) Benefisiasi, kegiatan kerja meningkatkan manfaat tata lingkungan dengan teknologi tepatguna, sehingga yang semula tidak bernilai yang menguntungkan, menjadi meningkat nilainya secara sosial, ekonomi, dan budaya
- b) Optimaslisasi, usaha mencapai manfaat seoptimal mungkin dengan mencegah kemungkinan terbuangnya salah satu unsur sumberdaya alam dan sekaligus meningkatkan mutunya.
- c) Alokasi, suatu usaha yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dalam menentukan peringkat untuk mengusahakan suatu tata lingkungan sesuai dengan fungsinya, tanpa mengganggu atau merusak tata alam

¹²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistic dan Phenomenologik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 38.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.

¹⁴ Shofwan Hanief dan Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media System Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2008), 1.

¹⁵ Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, S. N., Abdillah, D., Raditya, R., ... & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

- d) Reklamasi, memanfaatkan kembali bekas atau sisa suatu kegiatan kerja yang sudah ditinggalkan untuk dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan hidup manusia
- e) Substitusi, suatu usaha mengganti atau mengubah tata lingkungan yang sudah menyusut atau pudar kualitasnya dan kuantitasnya, dengan sesuatu yang sama sekali baru sebagai tiruannya atau lainnya dengan mengacu pada tata lingkungannya.
- f) Integrasi, pemanfaatan tata lingkungan secara terpadu hingga satu dengan yang lainnya saling menunjang, setidaknya antara perilaku budaya manusia dengan unsur lingkungannya bentukan alam atau hasil binaannya.
- g) Preservasi, suatu usaha mempertahankan atau mengawetkan runtunan alami yang ada, sesuai dengan hukum alam yang berlaku hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan¹⁶

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *Meneggiare* yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin *Manus* yang artinya tangan. Dalam bahasa perancis terdapat kata *Management* yang kemudian menjadi *Management*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, mengurus dan menyelenggarakan.¹⁷ Di sisi lain Efendi menyatakan manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *to manage* yang memiliki kesamaan dengan kata *to hand* yang berarti “mengurus”, *to control* “memeriksa”, *to guide* “memimpin” atau “membimbing”, jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam skala aktivitas-aktivitas manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas mengatur, menerbitkan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta menjadikan hidup lebih selaras, serasi dengan yang lainnya. Upaya mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan di lingkungan internal maupun eksternal yang ada termasuk di dalamnya kecenderungan terhadap pariwisata dalam konteks global¹⁸ bahwa manajemen pariwisata aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan serta pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

3. Distribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain.

¹⁶ I Gusti Bagus Rai Utami, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014).

¹⁷ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisataan* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), 13.

Menurut *Spicker* Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia. Melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial.

Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horisontal, yakni:

- a) Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi
- b) Redistribusi horisontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Misalnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horisontal dapat pula bersifat antar-pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya yang oleh *Spicker* disebut sebagai "*income smoothing*". Dalam konteks ini, *Spicker* menjelaskan bahwa jaminan sosial pada hakekatnya adalah dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayar manakala dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayar manakala sehat atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah membayar pada saat mereka masih bekerja¹⁹

Selain itu, ada beberapa teknik redistribusi pendapatan, sebagai berikut:

- a) Transfer Tunai, Bentuk transfer tunai ini adalah metode pemerataan dengan instrumen uang atau pendapatan yang diterima.
- b) Transfer Barang, Program transfer barang atau transfer in natura adalah program transfer dengan wujud yang ditransfer adalah barang fisik bukan uang.
- c) Program Kesempatan Kerja, Program kesempatan kerja adalah bentuk program distribusi pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja

4. Kebijakan yang mendukung dalam distribusi pendapatan Masyarakat

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat mewujudkan keadilan Masyarakat terhadap pendapatan sebagai berikut:

a. Riba

Riba yaitu Mengambil tambahan dari harta pokok dengan cara yang batil dalam utang piutang maupun jual beli. Dalam hal ini batil merupakan perbuatan ketidakadilan atau diam dalam menerima ketidakadilan. Pengambilan harta secara batil akan menimbulkan kedzaliman di antara pelaku ekonomi. Maka dalam hal ini esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Islam secara tegas melarang riba yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif ekonomi riba diharamkan oleh sebab-sebab berikut: *pertama*, sistem ekonomi yang tidak adil karena di timbulkan oleh riba, *kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjaman. *Ketiga*, sistem ribawi akan menyulitkan investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan Masyarakat untuk berinvestasi di

¹⁹ <https://www.academia.edu/24047216/Perekonomian> Indonesia Konsep dan Teori distribusi Pendapatan Pemerataan Pembangunan, Diakses pada Tanggal 13 September 2023, Pukul 15.00, WIB.

sektor riil. *Keempat*, bunga di anggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang produksi

b. Gharar

Gharar yaitu suatu penipuan yang sangat dilarang di dalam syariat Islam, karena hal ini akan merugikan salah seorang pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Dengan demikian gharar merupakan transaksi dengan keuntungan yang tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kecurangan informasi oleh pihak-pihak terkait yang sedang melaksanakan transaksi. Misalnya, dalam jual beli dengan harga yang tidak ditentukan di awal perjanjian, atau jual beli anak Binatang yang masing didalam kandungan induknya. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Ibn Mas'ud, dia berkata: Rasulullah bersabda "*janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena ada unsur gharar*" larangan menjual ikan dalam air seperti ungkapan hadis di atas, karena pada hakekatnya ia tidak diketahui dan masih sama atau tidak jelas.

c. Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim di dunia ini. Zakat juga memiliki fungsi sebagai salah satu system distribusi pendapatan dan kekayaan yang mengedepankan pada aspek keadilan. Dengan berzakat diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan harmonisasi orang miskin dan orang kaya. Zakat pada awal periode Islam dikelola oleh sebuah pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan Negara, karena kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan Pembangunan Negara secara keseluruhan.

d. Pelarangan Haram

Di dalam Qs.al-Baqarah [2]:168, bahwa Islam memiliki prinsip dasar terkait ekonomi harus *halalan thayyiban*. Yakni benar secara hukum Islam dan baik dari persepektif nilai dan moralitas Islam, kebalikannya adalah haram. Haram dalam hal ini terkait dengan zat prosesnya. Dalam zat Islam melarang mengkonsumsi memproduksi, mendistribusikan dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas yang tidak diperbolehkan (diharamkan) (Q.s. al-Maidah [5]: 3). Dalam hal proses Islam melarang (mengharamkan) setiap bentuk transaksi karena tiga hal (Pusat Pengkajian Ekonomi Islam UII, 72-73) yaitu: pertama, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (Q.s. an-Nisa [4]: 29) seperti pencurian, riba, perjudian dan lain-lain. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis. Ketiga, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum khamar dan lain-lain.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Objek Penelitian

Obyek wisata pantai Balongan terletak 2 km ke arah barat dari pusat pemerintahan kecamatan Kragan. Objek wisata ini berada di Desa Balongmulyo kecamatan Kragan

²⁰ Ummi Kulsum, Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 51-55

Kabupaten Rembang, lokasi pantai ini sendiri tidak jauh dari jalur pantura yaitu berjarak 300 meter saja, untuk kondisi jalan menuju pantai sekarang sudah di aspal oleh pemkab dan pantai Balongan memiliki daya tarik tersendiri. Yang menjadi ciri khas pantai ini adalah adanya pohon cemara di sepanjang pantai untuk mencegah terjadinya abrasi, pantai ini memiliki pohon cemara yang menjulang di sepanjang bibir pantainya. Selain untuk menahan abrasi, adanya pohon cemara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena dapat menikmati indahnya pemandangan pantai sambil merasakan kesejukan hijaunya pepohonan dengan bersantai di gazebo-gazebo atau gubuk yang berjajar di bawah pohon-pohon cemara. Pantai Balongan memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang biru serta deburan ombak yang tenang. Jadi di sini pengunjung dapat bermain air sepuasnya dengan aman termasuk aman juga bagi anak-anak dan merupakan dambaan wisatawan. Suasana di sekitar pantai memang sangat sejuk dan indah untuk memberikan kesan tersendiri bagi para pengunjung, karena sudah disediakan spot-spot untuk berfoto di beberapa titik, termasuk juga icon tulisan pantai Balongan di depan pintu masuk berbentuk layar perahu di kedua sisinya. Sehingga tempat ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga dan teman-teman atau acara santai lainnya.

Untuk mengetahui kondisi geografis dan kondisi masyarakat desa Balongmulyo kecamatan Kragan kabupaten Rembang dapat dipaparkan data profil desa Balongmulyo berdasarkan data monografi desa. Adapun data monografi tersebut adalah:

a. Kondisi Geografis Desa Balongmulyo

Berdasarkan data administrasi desa Balongmulyo. Bahwa luas desa Balongmulyo adalah 272.810 Ha. Desa Balongmulyo adalah salah satu Desa yang terdapat di daerah kawasan pesisir dan pantura. Jarak Desa ke Kecamatan 2 km dan jarak dari pusat pemerintahan kota 36 km, sedangkan jarak ke provinsi 136 km

b. Kondisi Ekonomi dan Masyarakat desa Balongmulyo

Masyarakat Desa Balongmulyo memiliki banyak mata pencaharian karena potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan diimbangi dengan banyaknya angka sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan perekonomian desa Balongmulyo. Mata pencaharian terbesar masyarakat Balongmulyo adalah sebagai nelayan, sehingga muncul tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai tempat jual beli ikan yang menjadi pusat penyetoran ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat desa Balongmulyo maupun desa sekitar. Potensi laut ini menjadi salah satu sumber perekonomian di kabupaten Rembang.

Selain itu, terdapat objek wisata pantai Balongan yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian oleh wisatawan karena keindahan pantainya. Biasanya objek wisata pantai Balongan ini sangat ramai pengunjung setiap harinya, apalagi di hari libur, dan menjadi tempat bagi perilaku ekonomi. Banyak masyarakat Balongmulyo memanfaatkan objek wisata pantai Balongan ini dengan menjadi pedagang maupun pembeli.

Keadaan topografi yang mayoritas dataran di sebelah selatan desa juga sangat cocok dijadikan lahan pertanian, sehingga dengan adanya perubahan sosial menghasilkan peningkatan di bidang teknologi dan menggerakkan sumber daya manusia desa

Balongmulyo untuk berinovasi memanfaatkan lahan pertanian atau perkebunan dengan menanam jagung, cabai, singkong padi dan tanaman pokok lainnya²¹

2. Deskripsi data

1. Pengelolaan Pariwisata Pantai Balongan

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru di dunia. Pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan-pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.²²

Di Kabupaten Rembang terdapat beberapa lokasi wisata bahari, salah satunya adalah wisata pantai Balongan yang terdapat di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan. Lokasi wisata pantai Balongan sangat strategis dan mudah untuk dijangkau oleh wisatawan, karena untuk menuju wisata tersebut dapat ditempuh melalui jalur darat. Wisata tersebut sangatlah sejuk dan nyaman untuk digunakan untuk rekreasi karena wisata tersebut terkenal dengan pohon cemara yang lebat. Di situ juga sudah disediakan fasilitas-fasilitas oleh pengelola untuk pengunjung seperti musholla, kamar mandi, tempat istirahat dan spot-spot untuk berfoto. Adanya wisata pantai Balongan tidak terlepas dari peran kepala desa, warga setempat dan *stakeholder* yang ada

Awal mula adanya wisata pantai Balongan bermula dari laporan warga kepada kepala desa karena melihat kondisi pantai Balongan dulu sering digunakan hal negatif seperti, mabuk-mabukan, berkelahi dan sering juga terjadi abrasi. Setelah mendapat laporan dari warga, kepala desa mempunyai inisiatif atau ide untuk menjadikan pantai Balongan sebagai tempat wisata, karena dilihat juga pantai tersebut mempunyai potensi yang besar untuk mengangkat perekonomian warga setempat, kemudian kepala desa, tokoh masyarakat dan *stakeholder* yang ada berencana menindaklanjuti dari inisiatif atau ide tersebut untuk menjadikan pantai Balongan sebagai tempat wisata dengan mengadakan musyawarah bersama. Kemudian Bapak Ali Nasikin selaku ketua pengelola dan sekdes desa mengatakan:

“Jadi awal mula pembentukan wisata pantai di sini adalah dengan melihat kondisi di lapangan karena sebuah abrasi pantai, dan akhirnya pemerintah desa dan dengan lembaga-lembaga yang ada serta masyarakat mempunyai inisiatif atau ide untuk menanggulangi abrasi tersebut dengan menanam pohon cemara dan 5 tahun sebelumnya pemerintah desa sudah bekerjasama dengan *stakeholder* yang ada, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dinas pariwisata. Dan kaitannya juga banyak tambang, sebenarnya peruntukannya bukan untuk pantai tapi untuk tambang yang akan direbosisasi, tapi pohon seperti ini mau ditanam di mana,

21 Sumber Data: Data Pemerintahan Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Dikutip pada Tanggal 11 September 2023.

22 Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

karena mengingat pohon seperti ini harus ditanam di daerah yang tandus, dan akhirnya pemerintah desa memutuskan untuk ditanam di pinggir pantai untuk mengatasi abrasi, dan setelah tumbuh besar mau dijadikan wisata hutan pantai, jadi awal mula bukan untuk pariwisata.”

2. Peran Wisata Pantai Balongan terhadap distribusi Pendapatan Masyarakat

Untuk memahami lebih jauh tentang peran objek wisata pantai Balongan yang dialami oleh masyarakat desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, peneliti mengadakan berbagai penelitian baik melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan melalui metode observasi peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di sekeliling obyek penelitian, khususnya aktifitas perekonomian yang terjadi akibat adanya objek wisata pantai Balongan terhadap pendapatan masyarakat di desa Balongmulyo kecamatan Kragan kabupaten Rembang. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti mengadakan wawancara dengan berbagai pihak baik masyarakat biasa maupun pemerintah.

Dengan adanya objek wisata pantai Balongan akan membuka lapangan pekerjaan, serta membuat peluang usaha baru. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan bagi keluarganya. Pendapatan tersebut mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Kemudian Bapak Ali Nasikin selaku ketua pengelola mengatakan:

“Dampak dari wisata di sini sangat luar biasa dan dengan adanya wisata pantai Balongan, dari beberapa warga dapat bekerja di sini, yang dulunya menganggur atau kerja serabutan sekarang sudah tidak lagi, dan masyarakat yang bekerja disini sebagai pedagang sekarang dapat mendorong perekonomiannya dan dampak Secara positif adalah kesejahteraan masyarakat.”

Bilamana pembangunan dan pengembangan pariwisata direncanakan dan di arahkan dengan baik, maka akan banyak manfaat dan dampaknya, antara lain:

- a. Manfaat ekonomi (kesejahteraan).
- b. Manfaat sosial budaya.
- c. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara.
- d. Manfaat bagi lingkungan.²³

3. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Pengelolaan Pariwisata Pantai Balongan

Dalam pemanfaatan alam sebagai atraksi wisata juga tidak terlepas dari unsur penunjang sebagai terapan konsep integrasi terpadu. Atraksi atau daya tarik wisata dapat berupa alam, masyarakat, atau minat khusus akan menjadi daya tarik bagi wisatawan jika didukung oleh unsur penunjang seperti kemudahan transportasi, pelestarian alam serta tersedianya akomodasi yang diinginkan oleh wisatawan.²⁴ Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Nasikin selaku ketua pengelola:

²³ Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Indutri Pariwisata* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 28-29.

²⁴ I Gusti Bagus Rai Utami, *Pengantar Industri Pariwisata...* 166-167

“Kalau produk atau atraksi kami berencana membuat kerajinan gerabah, karena dulunya di tempat ini adalah para pembuat pengrajin gerabah, jadi kami tidak hanya menjual jasa wisata tapi juga menjual kerajinan juga.”

Jadi pemanfaatan wisata pantai Balongan memang sudah cukup baik karena adanya produk atau atraksi yang ditawarkan seperti keindahan pantainya, pembuatan kerajinan gerabah dan adanya unsur penunjang seperti transportasi untuk menjadi daya tarik wisatawan tersendiri.

Pariwisata adalah sejumlah gejala/fenomena dan hubungan yang timbul dari suatu perjalanan yang jauh dan tidak untuk tinggal menetap serta tidak ada hubungannya dengan aktivitas mencari pekerjaan.²⁵ pariwisata secara nyata mampu memberikan tiga keuntungan secara langsung yaitu diterima langsung oleh karyawan di hotel, restoran, perusahaan ritail dan *transportation*, keuntungan selanjutnya pariwisata juga mampu memberikan support terhadap perkembangan industri dan peluang terbukanya pekerjaan, serta keuntungan terakhir yaitu pariwisata bersifat *multiplier effect*, di mana pendapatan dari pariwisata mampu membangkitkan perekonomian masyarakat lokal.²⁶

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dapat didefinisikan sebagai berikut pertama, bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata. *Kedua*, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata. *Ketiga*, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dengan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.²⁷

Jadi intinya, CBT merupakan perwujudan perluasan dampak sektor pariwisata pada pembangunan perekonomian lokal (*local economic development*) masyarakat di sekitar kawasan wisata. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berwirausaha di sektor pariwisata secara lebih luas.

Pengelolaan desa wisata yang baik menurut pariwisata inti rakyat (PIR) yaitu suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.²⁸

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

²⁵ Ni Luh Henny Andayani, *Manajemen Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

²⁶ Ni Luh Henny Andayani, *Manajemen Pemasaran Pariwisata*, 73.

²⁷ Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan*, 83.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan*, 68.

- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk dan dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.²⁹

Jadi dalam penetapan suatu desa yang ingin dijadikan desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan di atas. Desa Balongmulyo adalah salah satu desa yang memiliki persyaratan di atas untuk dijadikan desa wisata karena memiliki aksesibilitas yang baik, memiliki obyek wisata alam, masyarakat dan adat istiadat setempat juga mendukung, keamanan desa yang terjamin, akomodasi yang baik, beriklim sejuk dan juga berhubungan atau dekat dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

Dari beberapa pernyataan dari narasumber bahwa desa Balongmulyo adalah salah satu desa yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata karena adanya dukungan masyarakat setempat dan memiliki Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi dan Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas ke bawah (top down planning). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat tingkat pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan atau peranan. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat.

Program yang dilakukan dari atas ke bawah seringkali tidak berhasil dan kurang bertanggungjawab terhadap keberhasilan suatu program. Berdasarkan kondisi ini, pendekatan dalam perencanaan kemudian dikembangkan dengan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pendekatan tersebut lebih bersifat kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat. Dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik.

Perencanaan partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut.³⁰ Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Nasikin selaku ketua pengelola:

²⁹ Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan...* 68-69.

³⁰ Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan...* 17.

“Bahwa keputusan yang diambil dalam pembentukan wisata pantai Balongan yaitu dengan menggunakan Metode yang diambil dengan perwakilan, seperti lembaga-lembaga yang ada, perangkat-perangkat desa dan ketua per RT dan RW, karang taruna dan sebagainya. Dan masyarakat dalam mengidentifikasi di sini cukup dengan ikut menjaga keamanan dan kebersihan, adapun keterlibatan masyarakat dalam dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan Yaitu dengan menjaga kebersihan, keamanan, ikut merawat tanaman” di area pantai, dan memberikan ide atau saran. Karena kami mengharuskan mereka berpartisipasi dalam kegiatan di sini”

Jadi manfaat dalam mengimplementasikan konsep desa wisata yaitu, dengan adanya desa wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat serta budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya tarik utama wisatawan. Dengan kata lain suatu desa tidak akan memiliki daya tarik apabila tidak memiliki budaya, adat istiadat yang unik. Dengan konsep ini maka secara otomatis masyarakat desa yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, dapat berperan aktif dalam kelangsungan desa wisata. Dengan kata lain, timbul peluang kerja baru yang berpotensi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa setempat. Akhir dari konsep ini tentu saja agar dapat peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat dan masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif dalam menjaga alam sekitar. Lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat adalah salah satu komponen daya tarik desa wisata.

b. Analisis Peran Wisata Pantai Balongan terhadap distribusi Pendapatan Masyarakat

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan taraf penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga merealisasi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan-penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.³¹

Pariwisata berbasis masyarakat adalah salah satu bentuk Pengelolaan wisata yang baik dan dirasa dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Balongmulyo, sebagaimana Nurhidayati yang dikutip oleh Gde Satria mendefinisikan *Community Based Tourism* sebagai berikut *pertama*, bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata. *Kedua*, memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata. *Ketiga*, menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis dengan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di perdesaan.³² Penjelasan mengenai pengelolaan wisata berbasis masyarakat di atas dapat menggambarkan tentang redistribusi pendapatan yang berupa vertikal maupun horisontal yaitu bagaimana pengelola membantu warga yang lemah secara ekonomi dan untuk meningkatkan taraf perekonomiannya dan warga juga diwajibkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya dari tahap perencanaan,

³¹ Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), 32-33.

³² Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan...* 83.

pelaksanaan dan evaluasi. dengan cara dibuatkan wisata secara otomotif akan membuka lapangan pekerjaan bagi warganya dengan cara berjualan atau berdagang.

Pariwisata juga menciptakan kesempatan bekerja, tidak sulit memahami bahwa pariwisata menciptakan kesempatan kerja. Sarana-sarana pariwisata seperti tempat tinggal dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya. Itu semua mengenai tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan pariwisata. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan tenaga kerja di bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Yang terpenting di bidang konstruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk keperluan wisatawan seperti rumah makan, toko-toko dan jalan-jalan harus dibuat atau ditingkatkan kondisinya. Wisatawan-wisatawan memerlukan makan dan minum, ini semua secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Balongmulyo. Seperti yang dikatakan Ibu Kalimah sebagai pedagang mengatakan

”Dengan adanya obyek wisata di sini saya sangat senang sekali mas, karena dapat menciptakan kesempatan kerja bagi saya, dan juga bukan yang ada di dalam area pantai saja yang ikut merasakan, pedagang yang di luar pantai juga ikut merasakan, yang tadinya kecil jadi besar, kayak es batu dibutuhkan, bahan-bahan rujak, jadi semua merasakan.”

Pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Keberhasilan pariwisata terlihat dari penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata dapat mendorong sektor lainnya untuk berkembang. Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati adalah bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan dari periode ke periode. Pertambahan jumlah wisatawan dapat terwujud jika wisatawan yang telah berkunjung puas terhadap destinasi dengan berbagai atribut yang ditawarkan oleh pengelolanya. Wisatawan yang puas akan cenderung menjadi loyal untuk mengulang liburannya di masa mendatang, dan memungkinkan mereka merekomendasikan teman-temannya, dan kerabatnya untuk berlibur ke tempat yang sama.³³ Seperti yang dirasakan oleh saudara Anshori sebagai pengunjung mengatakan:

“Saya tahu tempat ini dari teman ke teman mas, katanya tempatnya strategis, murah dan gratis, jadi saya penasaran dengan tempatnya. Dan tempatnya juga dekat dengan jalan pantura, harga juga terjangkau, dan gak mahal banget, kemudian pantainya juga bersih, dan saya di sini mendapatkan ketenangan dan kebersamaan mas, kemudian Kalau menurut saya pantainya sangat bagus, indah dan belum banyak dijangkau orang, kesannya pengen balik lagi mas, solanya ada rujak petisnya. Dan untuk untuk fasilitasnya bisa di perbanyak lagi”

Fungsi dan peran usaha kecil sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, sebagai nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.³⁴ Seperti yang dikatakan oleh Bapak Romi Adi bahwa:

”Wisata pantai Balongan sangat berpotensi meningkatkan atau pemerataan pendapatan masyarakat setempat, karena sektor pariwisata memiliki *multiplier effect*/dampak ganda ekonomi Desa Balongmulyo, karena adanya pantai Balongan masyarakat setempat mendapatkan lapangan pekerjaan di area destinasi wisata.”

³³ I Gusti Bagus Rai Utami, *Pengantar Industri Pariwisata*...143.

³⁴ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 3.

Pariwisata merupakan gejala sosial sangat kompleks, menyangkut manusia, memiliki berbagai aspek mendapat perhatian paling besar dan merupakan satu-satunya aspek penting yaitu aspek ekonominya. Keuntungan ekonomi untuk daerah yang dikunjungi pada awalnya merupakan tujuan pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata, khususnya berkaitan dengan perkembangan infrastruktur dan kehadiran wisatawan menimbulkan perubahan beberapa bidang di daerah yang bersangkutan. Dampak perubahan tersebut, sangat memengaruhi kehidupan dan perilaku masyarakat, yang sebagian menguntungkan dan sebagian lagi merugikan. Dengan demikian, jelas bahwa setiap dampak yang menguntungkan dapat juga membawa implikasi yang ada kaitannya dengan segi yang negatif.³⁵ Dampak pariwisata yang menguntungkan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyumbang kepada neraca pembayaran sebagai penghasil valuta asing.
- b. Menyebarkan pembangunan ke daerah non industri.
- c. Menciptakan kesempatan kerja.
- d. Dampak pada pembangunan ekonomi pada umumnya melalui dampak pengendalian.
- e. Keuntungan sosial yang timbul karena perhatian rakyat pada umumnya pada masalah dunia bertambah luas dan adanya pemahaman baru tentang orang asing dan selera asing.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data penelitian yang peneliti lakukan tentang dampak pengelolaan wisata pantai Balongan terhadap pemerataan pendapatan masyarakat di Desa Balongmulyo kecamatan Kragan kabupaten Rembang, peneliti memperoleh data yang sudah dicermati dan dianalisis maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Proses pengelolaan potensi wisata pantai Balongan

Pantai Balongan memiliki potensi wisata alam yang sangat unik untuk dikembangkan, bentuk pengelolaan potensi pariwisata yang ada di pantai Balongan menggunakan bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu masyarakat berperan penuh sebagai perencana, pelaksana, pemantau maupun evaluator dalam pengelolaan wisata pantai Balongan. Konsep ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa keselarasan antara pemerintah dan swasta maka dari itu yang disebut *stakeholder* dalam konsep pengelolaan wisata berbasis masyarakat adalah masyarakat, pemerintah dan swasta..

Proses partisipasi masyarakat dalam konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan, karena walau bagaimanapun masyarakat adalah elemen dari pembangunan itu sendiri, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program-program tidak akan optimal dilakukan.

Seperti dalam pengelolaan potensi wisata pantai Balongan, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena yang tahu sepenuhnya mengenai informasi, kondisi lapangan, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi ini disadari betul betapa pentingnya bagi masyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat mengetahui mengenai pengelolaan pariwisata dan dapat menimbulkan rasa memiliki yang tinggi. Adapun partisipasi masyarakat yang dilakukan di wisata pantai Balongan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dilibatkan dalam merumuskan program
- b. Masyarakat dilibatkan menjaga keamanan
- c. Masyarakat dilibatkan menjaga kebersihan

³⁵ Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*, 103.

³⁶ Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*, 104.

- d. Masyarakat lokal banyak yang menjadi pedagang
2. Peran wisata pantai Balongan terhadap pendapatan masyarakat lokal

Peran dari Pengelolaan wisata pantai Balongan mempunyai dampak positif bagi masyarakat lokal. Dampak yang dirasakan dari hasil pengelolaan wisata pantai Balongan adalah masyarakat Balongmulyo dalam segi ekonomi dengan adanya pengelolaan wisata pantai Balongan ini masyarakat mempunyai ladang ekonomi baru selain menjadi nelayan atau menjadi petani, masyarakat dapat berdagang di area wisata pantai Balongan untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung seperti makanan dan minuman atau penyewaan ATV dan pakaian untuk berenang. Dari hasil perekonomian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balongmulyo, masyarakat sekitar dan bagi pemerintah desa Balongmulyo dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dari adanya wisata pantai Balongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, S. N., Abdillah, D., Raditya, R., ... & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Daryanti, "Kontribusi Objek Wisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singing menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013).
- Dimas Kurnia Purmada dan Luchman Hakim, "Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism", *Jurnal Administrasi Bisnis* 32, no. 2 (2016).
- <http://bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1329/proporsi-kontribusi-Pariwisata-terhadap-pdb-2015>. Diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 00.11. WIB.
- <http://bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1357/jumlah-devisa-sektor-Pariwisata-2015>.html. Diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 00.31. WIB.
- <http://www.academia.edu/24047216/Perekonomian> Indonesia Konsep dan Teori distribusi Pendapatan Pemerataan Pembangunan, Diakses pada Tanggal 13 September 2023, Pukul 15.00, WIB.
- I Gusti Bagus Rai Utami, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014).
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Ni Luh Henny Andayani, *Manajemen Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistic dan Phenomenologik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).
- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), 32-33.
- Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996).
- Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Shofwan Hanief dan Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media System Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Suryo Sakti Hadiwioyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab III Mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5.

Kulsum Ummi, *Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018